



PENDISTRIBUSIAN GANDENG PT POS INDONESIA

Dinsos Minta BST untuk Penuhi Kebutuhan Primer

YOGYA (KR) - Pemda DIY melalui Dinas Sosial (Dinsos) siap menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bentuk konsekuensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Penyaluran BST kepada KPM sebesar Rp 300 ribu perbulan selama 2 bulan, yaitu Mei dan Juni ini guna meringankan beban kebutuhan harian masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinsos DIY Endang Patmintersih mengatakan BST akan dialokasikan kepada setidaknya 127.400 KPM di DIY, di mana jumlahnya sama dengan data penerima BST pada Januari - April 2021. Namun, jumlah KPM ini masih terus berproses sesuai dengan realisasi mengikuti berbagai kemungkinan antara lain data sudah tidak relevan karena adanya kematian, per-

pindahan penduduk dan lain-lain.

"BST Rp 300 ribu perbulan diberikan setiap KPM sebagai kelanjutan program serupa periode Januari - April lalu. Jadi KPM yang berhak akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu di bulan ini. Jumlah kuota penerima BST terus bergerak," ujarnya di Yogyakarta, Minggu (18/7).

Endang menyampaikan masyarakat tidak perlu mendaftar karena data penerima BST ini merupakan usulan dari kabupaten/kota di DIY dan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini sudah diverifikasi Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kemen-

terian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kemudian muncul Surat Keterangan (SK) Dirjen bagi KPM penerimaan BST.

"Penerima BST lanjutan harus memenuhi sejumlah kriteria seperti tidak menerima bantuan sosial program lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan sembako supaya pendistribusian-nya tepat sasaran atau tidak double. Selain itu, penerima BST harus memiliki NIK, Kartu Keluarga (KK) dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi," jelasnya.

Terkait pendistribusian penyaluran BST tersebut, Endang menyatakan Kemensos telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia termasuk di DIY. Namun perlu dicermati pendistribusian via pos ini terkait dengan penumpukan antrean. Hal ini berkaca dari penyaluran BST tahun lalu yang menimbulkan

kerumunan, pihaknya melakukan dua metode distribusi yaitu kantor pos cabang dan kelurahan.

"Kita mencari model penyaluran BST supaya tidak ada penumpukan masyarakat dengan dua metode yaitu kantor pos dengan diatur jadwal dan proses ketat serta dikawal Gugus Tugas Penanganan Covid-19 setempat atau lewat kelurahan. Waktu distribusi di kelurahan akan semakin panjang karena menyebar tim, namun metode ini lebih aman dan akses lebih dekat," ungkapnya.

Dinsos telah berkoordinasi dengan kabupaten/kota bersama PT Pos Indonesia yang beroperasi di wilayah DIY sudah siap menyalurkan BST tersebut, hanya menunggu instruksi resmi dari Kemensos. Pihaknya berharap BST ini bisa dimanfaatkan KPM untuk kebutuhan primer, terutama kebutuhan pangan terutama selama PPKM Darurat. (Ira)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005